

## ABSTRAK

**DANA PUNGKY TRI RAHAYU. E.1810862, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2016 (Studi :Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG)", Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor 2023.**

Perlindungan anak adalah kewajiban setiap lapisan masyarakat baik dari institusi pendidikan, negara, orangtua, lembaga masyarakat. Tapi pada kenyataan, masih banyak anak yang mengalami kekerasan, baik fisik, psikis maupun seksual. Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual tentu sangat buruk dan bertentangan dengan cita-cita negara dalam membentuk generasi yang dapat tumbuh dengan baik dan sehat agar dapat meneruskan dan membangun negeri menjadi lebih baik. Maka negara melindungi anak melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Maka dari itu permasalahan yang akan dibahas adalah Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak dalam peraturan perundang-undang di Indonesia khususnya anak korban tindak pidana Kekerasan seksual serta implementasi ketentuan tersebut di atas dalam praktik peradilan khusus dalam putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dalam peraturan perundang-undang di Indonesia khususnya anak korban tindak pidana Kekerasan Seksual serta Untuk mendapatkan gambaran implementasi perlindungan terhadap anak dalam praktik peradilan khususnya dalam putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG. Metode yang dipakai menggunakan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, Kesimpulan Terdapat beberapa pengaturan yang diperbarui dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2016. Hakim mengabulkan tuntutan terdakwa dan kemudian menjatuhkan hukuman mati, juga korban menerima restitusi dan rehabilitasi, Putusan tersebut selaras dengan cita-cita negara dalam melindungi hak-hak anak, adanya restitusi dan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diharapkan dapat membantu dalam memulihkan korban. Hukuman mati yang diterima oleh terdakwa mencerminkan bahwa hukum di negara ini tidak mentolelir adanya kekerasan seksual terlebih kepada anak yang mempunyai perlindungan khusus. Saran Peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya haruslah sesuai dengan tujuan berusaha bersama, yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi sehingga organisasi ini berdampak positif bagi anggotanya misalnya Dalam rangka pelatihan pengembangan sumber daya manusia, koperasi dapat menempatkan pendekatan baik struktural maupun kultural.

Kata kunci : Perlindungan Anak, restitusi, Kekerasan Seksual

## **ABSTRACT**

**DANA PUNGKY TRI RAHAYU. E.1810862, “Legal Protection of Child Victims of Sexual Violence According to Law No. 17/2016 (Study: Decision Number 86/PID.SUS/2022/PT BDG)” , Law Study Program, Faculty of Law, Djuanda University Bogor, 2023.**

*Child protection is the obligation of every layer of society both from educational institutions, the state, parents, community institutions. But in reality, there are still many children who experience violence, both physical, psychological and sexual. The impact of sexual violence is of course very bad and contrary to the aspirations of the state in forming a generation that can grow well and be healthy so that they can continue and build a better country. So the state protects children through Law Number 17 of 2016. Therefore, the issue that will be discussed is the regulation of legal protection for children in Indonesian laws and regulations, especially child victims of sexual violence and the implementation of the above provisions in special judicial practice in decision Number 86/PID.SUS/2022/PT BDG. Research Objectives To find out and analyze legal protection for children in Indonesian laws and regulations, especially child victims of sexual violence and to get an overview of the implementation of child protection in judicial practice, especially in decision No. 86/PID.SUS/2022/PT BDG. The method used is research using a normative. This approach is also known as the doctrinal approach/research or normative legal research. Conclusion There are several amended provisions in Law number 17 of 2016. The judge granted the defendant's demands and then sentenced him to death, also the victim received restitution and rehabilitation. The death penalty received by the defendant reflects that the law in this country does not tolerate sexual violence especially against children who have special protection. Suggestions The role of cooperatives in improving the welfare of their members must be in accordance with the purpose of working together, which consists of those who are weak and strive to always be self-motivated in such a way that each is able to carry out their obligations as members and receive rewards commensurate with their utilization of the organization so that this organization has a positive impact on its members, for example In the framework of human resource development training, cooperatives can take both structural and cultural approaches.*

*Keywords: Child Protection, Restitution, Sexual Violence.*